

IMPLIKASI ONE CHINA POLICY TERHADAP KEMERDEKAAN TAIWAN

Dian Pertiwi 1910412014

Aryana Fahira 1910412020

Vany Oktaviany 1910412032

dianp@upnvj.ac.id aryanaf@upnvj.ac.id vanyoktaviany@upnvj.ac.id

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

ABSTRAK

Studi ini mengkaji mengenai *One China Policy* yang dikeluarkan oleh pemerintahan China. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai upaya menarik kembali wilayah Taiwan untuk menjadi bagian dari provinsinya setelah terjadinya kekalahan partai beraliran nasionalis, partai Koumintang (KMT) dari partai Komunis (PKC) dalam perang saudara. Namun Taiwan tidak ingin kembali pada China dengan beberapa pertimbangan yang mana keduanya memiliki perbedaan seperti dalam hal ideologi dan prinsip dalam menjalankan pemerintahan. Meskipun Taiwan menolak untuk tunduk pada *One China Policy*, pemerintah China seolah memperketat implementasinya terhadap kebijakan tersebut. Hal ini menyulitkan Taiwan untuk sepenuhnya menjadi negara yang merdeka karena sulitnya memperoleh pengakuan dari dunia internasional. Meskipun begitu Taiwan terus berupaya agar mendapatkan pengakuan melalui kerjasama dengan negara lain dan menjadi keanggotaan organisasi internasional.

Kata Kunci: kebijakan, *One China Policy*, Taiwan, Partai Koumintang Tiongkok, Partai Komunis China.

ABSTRACT

This study examined One China Policy that published by China government. This policy is an effort to reclaim Taiwan's territory to become part of its province after the defeat of the nationalist party, the Koumintang Party (KMT) from the Communist Party (CCP) in the civil war. However, Taiwan does not want to get back together with China with several considerations, both of which have differences, such as in terms of ideology and principles in running government. Although Taiwan refuses to submit to the One China Policy, the Chinese government seems to tighten its implementation of the policy. This makes it difficult for Taiwan to become a fully independent country because of the difficulty of gaining recognition from the international community. Even so, Taiwan continues to strive to gain recognition through cooperation with other countries and membership of international organizations.

Keywords: policy, One China Policy, Taiwan, Koumintang Party, Chinese Communist Party.

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemisahan Taiwan dari China terjadi setelah larinya partai Koumintang ke Taiwan ketika kalah dari perang saudara yang terjadi di China. Perang saudara tersebut terjadi karena adanya perebutan kekuasaan oleh dua partai, yaitu partai Koumintang Tiongkok dan partai Komunis Tiongkok yang juga memiliki ideologi yang berbeda. Di awal pemisahan tersebut, kedua partai tersebut merasa bahwa mereka-lah yang berhak dalam memimpin China dan berupaya untuk saling merebut kekuasaan pemerintahan. Ketika kondisi semakin memburuk yang mana keduanya berupaya saling menjatuhkan dan keadaan China yang memburuk maka dikeluarkanlah *One China Policy*. Dalam *One China Policy*, terdapat pengakuan bahwa Taiwan merupakan bagian dari kedaulatan China sehingga negara-negara yang ingin berhubungan diplomatik dengan kedua pemerintahan tersebut diharuskan untuk memilih salah satu diantaranya. Namun, Taiwan tidak setuju dengan hal tersebut dan memilih untuk menjadi negara yang independen. Namun untuk menjadi negara yang berdaulat seutuhnya sangat sulit bagi Taiwan.

Dengan berlakunya *One China Policy*, banyak negara dan organisasi internasional yang tidak mengakui negara Taiwan dan tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hambatan untuk mendapatkan pengakuan dunia internasional yang terjadi membuat status negara Taiwan dalam dunia internasional pun masih dipertanyakan. Meskipun begitu, Taiwan tidak menyerah begitu saja. Taiwan menjalin hubungan dengan negara-negara di dunia dan berupaya menjadi bagian dari keanggotaan organisasi internasional. Oleh karena itu dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai faktor dan proses terbentuknya *One China Policy*, respon Taiwan terhadap *One China Policy*, dan implikasi *One China Policy* terhadap status kemerdekaan Taiwan.

Teknik penulisan yang digunakan dalam paper ini ialah penulisan deskriptif yaitu penyajian data atau gambaran terperinci, sistematis, dan menyeluruh tentang situasi tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penulisan paper ini berupa dokumen, buku, jurnal dan sumber lainnya yang diperoleh melalui media cetak dan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi pustaka dengan membaca dan menganalisa berbagai literatur yang sesuai dengan topik yang dibahas dalam paper ini. Penyajian data dilakukan dengan bentuk narasi yang menjabarkan secara jelas dan terstruktur berdasarkan topik yang dibahas dalam paper ini mengenai implikasi *One China Policy* terhadap kemerdekaan Taiwan.

KERANGKA TEORI

Dalam tulisan ini penulis menggunakan kerangka berpikir konstruktivisme. Teori ini memfokuskan kajiannya pada kesadaran manusia dan perannya dalam hubungan internasional. Alasannya, karena masyarakat terdiri dari individu-individu yang memiliki kesadaran untuk bertindak. Fokus utama dari teori konstruktivisme adalah interaksi orang-orang dalam penguasaan dan penyempurnaan keterampilan dan pengetahuan. Kaum konstruktivisme sendiri menyatakan bahwa kepentingan nasional juga disusun oleh unsur-unsur *intangibile* seperti identitas, norma, serta faktor lainnya. Identitas sendiri melekat pada setiap individu dan memungkinkan adanya interaksi sosial baik antar individu maupun kelompok. Identitas juga menjadi dasar pemaknaan

aktor terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tanpa adanya identitas maka akan sulit untuk membedakan satu sama lain.

PEMBAHASAN

Definisi *One China Policy*

Dalam bidang politiknya, China dikuasai oleh satu partai saja, yaitu Partai Komunis China (PKC). Awal mula dari adanya *One China Policy* adalah akibat terjadinya perselisihan antara dua partai dengan dua ideologi yang berbeda. Partai Komunis China (PKC) sesuai namanya menganut ideologi komunis dan digunakan sebagai ideologi China sampai saat ini. Sedangkan partai lain yang menjadi lawan Partai Komunis China (PKC) menganut ideologi nasionalis dan dikenal dengan nama partai Kuomintang Tiongkok. Nama partai ini didapat dari terjemahan Kuomintang sendiri yang artinya adalah partai nasionalis.

One China Policy merupakan sebuah pengakuan diplomatik dari China yang menyatakan bahwa hanya ada satu pemerintah China yang resmi yang mencakup China daratan, Hong Kong, Macau, dan Taiwan. Dengan kata lain, China membuat kebijakan ini untuk menyatakan bahwa Taiwan merupakan wilayah yang masih berada di teritori China. Jika negara-negara lain ingin tetap bekerjasama dengan China, maka negara tersebut harus menghormati serta mengakui posisi China yang resmi hanya memiliki satu pemerintahan (UMYRepository).

Meskipun terjadi persetujuan dengan dikeluarkannya *One China Policy*, Taiwan dan China daratan masih tetap menjalin hubungan yang baik. Alasannya adalah jika melakukan klaim negara masing-masing akan sangat melelahkan serta perang akan memerlukan banyak biaya dan akan memakan banyak korban jiwa. Selain itu, Taiwan pun tidak mungkin bergabung bersama China karena memiliki standar dalam kehidupannya yang lumayan tinggi dan juga menjunjung tinggi kebebasan dalam berpolitik. Hal tersebut karena Taiwan merupakan negara demokratis yang memiliki sifat terbuka dalam pemilihan umum serta dapat menentang pengekangan yang terjadi. Masyarakat Taiwan sempat melakukan demonstrasi untuk memprotes perjanjian dagang yang telah dibuat dengan China. Dengan begini, masyarakat Taiwan harus menyadari bahwa China merupakan partner dagang terbesar bagi Taiwan (UMYRepository).

Faktor dan Proses Dikeluarkannya *One China Policy*

Republik Rakyat China (RRC) merupakan negara yang dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta negara dengan wilayah yang luas ke-4 di dunia. Taiwan yang berdiri dan menganggap dirinya adalah sebuah negara tidak ingin kembali atau bergabung kembali dengan China. Namun, pemerintahan China menganggap bahwa wilayah yang ditempati Taiwan adalah bagian dari China daratan dan pemerintahan China mengatakan bahwa mereka akan membuat Taiwan kembali lagi sebagai bagian dari China bagaimana pun caranya, meskipun hal itu harus menggunakan kekerasan (UMYRepository).

Setelah Perang Dunia II selesai, Taiwan kembali kepada China yang mana sebelumnya berpisah karena adanya Perang Saudara China dari tahun 1940-an secara *de jure* dan *de facto*. Tak lama setelahnya, banyak campur tangan berupa bantuan diplomatik dan kekuatan dari pihak-pihak luar yang memunculkan masalah baru yang berkaitan dengan perang saudara (Kuomintang

Tiongkok). Selama terjadinya perang di China terhadap anti Jepang, partai Kuomintang Tiongkok beserta dengan Partai Komunis Tiongkok telah membuat kelompok penyatuan nasional yang berdasar pada anti Jepang guna melawan agresi imperialisme Jepang. Setelah perang anti Jepang tersebut mengalami kemenangan, Chiang Kai-shek sebagai perwakilan partai Kuomintang yang juga merupakan seorang nasionalis yang sempat memimpin dan menguasai China dan sebelumnya pun pernah dipimpin oleh Chun Yat Shen. Dengan bantuan dan dukungan Amerika, Chiang Kai-shek menyebarkan perang saudara di seluruh negeri China. Seluruh rakyat China yang dipimpin oleh Partai Komunis Tiongkok tidak tinggal diam dan selama kira-kira 3 tahun lebih rakyat China bersama dengan Partai Komunis Tiongkok melancarkan perang pembebasan yang membuat pemerintahan “Republik Tiongkok” milik Kuomintang Tiongkok berhasil diberantas. Chiang Kai-shek bersama dengan kelompoknya yang berhaluan nasionalis berhasil dikalahkan oleh Partai Komunis Tiongkok pada tahun 1949 yang dipimpin oleh Mao Zedong. Kemudian partai Kuomintang Tiongkok beserta pemimpinnya Chiang Kai-shek melarikan diri dan menetap di pulau timur China yang dikenal dengan nama Taiwan. Mereka membangun pemerintahan mereka sendiri dengan ibukotanya yang dinamai Taipei (UMYRepository).

Kepergian orang-orang sosialis tersebut ternyata tidak membuat kondisi politik di China menjadi baik kembali. Hal yang terjadi justru membuat hubungan diplomatik antara China dan Taiwan terus mengalami kekacauan. Sejak memisahkan diri dari China, Taiwan diakui sebagai suatu negara hanya oleh beberapa negara saja. Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) hanya mengakui Taiwan sebagai provinsi dari negara China. Kemudian, pemerintahan China mengeluarkan sebuah kebijakan yang dinamakan *One China Policy* atau dikenal juga dengan Kebijakan Satu China yang mana kebijakan ini berisi bahwa hanya terdapat satu pemerintahan China yang berdaulat. Dalam keadaan ini, China ingin menjelaskan bahwa keberadaan Taiwan merupakan wilayah atau bagian dari China dan tidak dianggap sebagai sebuah negara yang terbentuk sendiri diluar China. Selain Taiwan, pemerintahan China juga mengakui keberadaan wilayah Hongkong dan Macau sebagai negara yang memiliki integritas dengan China. Hal ini menyebabkan segala hubungan kerjasama atau diplomatik dengan China harus melalui satu pemerintahan yang harus disetujui oleh negara yang ingin menjalin hubungan kerjasama atau diplomatik dengan China tersebut (UMYRepository).

Pemerintahan China mendeklarasikan *One China Policy* ini dalam forum internasional dan menyatakan bahwa Taiwan memang sudah seharusnya tunduk dan mematuhi *One China Policy* karena Taiwan telah menyepakati konsensus bersama dengan China pada tahun 1992 di Hongkong. Dengan demikian, China menganggap bahwa kebijakan *One China Policy* ini merupakan sebuah kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat kembali oleh siapa pun termasuk Taiwan. Namun, Chen Shui-bian, selaku mantan presiden Taiwan menolak untuk mengakui *One China Policy* dan ia juga mengatakan bahwa sejak 1949, China dan Taiwan tidak lagi dapat mewujudkan sebuah sinergi, sehingga Taiwan harus terus mengupayakan sebuah negosiasi sebagai upaya tercapainya kedaulatan yang penuh sebagai sebuah negara yang tidak identik dengan China (UMYRepository).

Melalui *One China Policy*, Taiwan harus mengikuti dan mematuhi kebijakan tersebut. Namun, kebijakan ini tidak membuat Taiwan ingin bergabung dengan China. Taiwan sebagai sebuah wilayah menganggap dirinya merupakan sebuah negara yang berdaulat karena secara *de facto*, Taiwan dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Ketidakinginan Taiwan untuk bergabung dengan China ini tidak membuat *One China Policy* ini dicabut atau dibatalkan. China justru

membuat kebijakan ini menjadi semakin ketat dengan mengatakan bahwa setiap negara yang ingin menjalin hubungan kerjasama dan diplomatik dengan China harus mengikuti dan mematuhi *One China Policy* (UMYRespository).

Prinsip *One China Policy* ini dikatakan sebagai sebuah perjalanan bagi rakyat China sebagai upaya untuk melindungi pemerintahan dan kedaulatan China serta integritas wilayah-wilayahnya. Taiwan merupakan bagian dari China yang dikatakan tak terpisahkan karena semua fakta dan hukum mengenai Taiwan dapat menjadi bukti bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah China yang tak terpisahkan. Pada hari ditetapkannya *One China Policy*, China mengatakan kepada seluruh pemerintahan negara di dunia bahwa pemerintahan China merupakan pemerintahan satu-satunya yang sah yang menjadi perwakilan dari seluruh rakyat China (Slate.com, 2000).

Sejarah Awal Kemerdekaan Taiwan

Taiwan merupakan sebuah pulau yang dikenal dengan nama Formosa yang berada di lepas pantai tenggara China. Secara resmi Taiwan masih belum diakui sebagai sebuah negara yang berdaulat karena China memberlakukan kebijakan *One China Policy* kepada negara lain di dunia. Namun, Taiwan tetap menyebut dirinya sebagai sebuah negara yang menerapkan ideologi nasionalis dan tidak ingin disamakan dengan China, sehingga China menyebut Taiwan sebagai sebuah provinsi yang memberontak. Sejarah mencatat bahwa rakyat China melakukan imigrasi ke Taiwan mulai abad ke-17, dimana pada saat itu berada di tangan China setelah masa penjajahan Belanda pada tahun 1624-1662. Pada tahun 1949, sekitar dua juta pengikut Partai Koumintang melarikan diri ke Taiwan untuk mendirikan sebuah pemerintahan terpisah setelah kalah dalam perang sipil oleh Partai Komunis. Sejak saat itu, Chiang Kai-Shek sebagai pemimpin Partai Koumintang akhirnya memimpin Taiwan hingga kematiannya pada tahun 1975 dan diteruskan oleh putranya, Chiang Ching-Kuo pada tahun 1978.

Transisi pemerintahan dari yang otoriter menjadi demokratis terjadi sejak tahun 1980, sehingga memunculkan partai-partai yang menjadi oposisi seperti Democratic Progressive Party (DPP). Ketika DPP memerintah Taiwan pada tahun 2000-2008 oleh kepemimpinan Chen Shui Bian, mulai terjadi banyak gesekan antar partai dalam politik domestik Taiwan. Namun, serangkaian skandal korupsi yang melibatkan Presiden Chen, keluarganya dan anggota senior DPP mengakibatkan citra partai tercoreng dan kalah pada pemilihan presiden 2008. Kemenangan Partai Koumintang yang dipimpin Ma Ying Jeou membawa kestabilan dan harmonisasi untuk hubungan Taiwan dan China. Hubungan baik tersebut membawa dampak bagi perekonomian Taiwan, sehingga penerbangan langsung antara dua wilayah tersebut akhirnya diluncurkan dan diikuti dengan langkah-langkah untuk meningkatkan sektor pariwisata. Taiwan dan China melakukan Perjanjian Kerjasama Kerangka Ekonomi yang ditandatangani pada tahun 2010 untuk mengurangi hambatan komersial. Namun hal tersebut justru menjadi peluru bagi Taiwan, karena masyarakat Taiwan khawatir dengan semakin dominannya pengaruh China. Partai Koumintang akhirnya menderita kekalahan pada pemilu lokal tahun 2014, sehingga harus mengganti presiden mereka pada tahun 2015. Pandangan presiden Taiwan yang terlalu pro terhadap China mengakibatkan Taiwan resmi dianggap sebagai bagian dari wilayah China yang sedang menunggu reunifikasi dan China juga mengancam akan menyerang Taiwan jika memproklamkan kemerdekaannya secara resmi.

Respon Taiwan terhadap *One China Policy*

Partai Komunis China dibawah kepemimpinan Mao Zedong pada tahun 1953-1959 sudah merencanakan mengenai reunifikasi Taiwan-China, tetapi alasan utama dalam melakukan reunifikasi adalah untuk menghancurkan Partai Koumintang yang beraliran nasionalis. Namun, pada masa kepemimpinan Deng Xioping, reunifikasi lebih diutamakan menggunakan cara damai. *One China Policy* merupakan cara China untuk memperjuangkan Taiwan agar kembali kepada pemerintah China. Pemicu dari kebijakan ini sendiri adalah penggunaan nama *People Republic of China* oleh Chiang Kai Shek selama ia memimpin Taiwan. Walaupun Taiwan bersikeras bahwa dirinya merupakan sebuah negara, China tetap memandang Taiwan sebagai bagian dari China daratan dan bagaimana-pun caranya Taiwan harus kembali kepada China.

Terkait *One China Politik* pada masa pemerintahan Presiden Ma menunjukkan bahwa pembentukan organisasi SEF, ARATS, ECFA merupakan sebuah respon dengan anggapan bahwa hal tersebut hanya untuk memperbaiki hubungan antara Taiwan dan China. Dengan kata lain, Taiwan tidak tertarik untuk melakukan reunifikasi. Selain pada pemerintahan Presiden Ma, penolakan reunifikasi dengan China juga terjadi pada masa pemerintahan Presiden Chen. Penolakan tersebut bukan hanya ditunjukkan secara internal, tetapi juga secara eksternal dengan mengupayakan diplomasi untuk menghambat China dalam mereintegrasikan Taiwan. Namun China menunjukkan respon baik terhadap upaya yang dilakukan Taiwan untuk memperbaiki hubungan dengan China, karena China masih mengharapkan reunifikasi secara damai dengan Taiwan.

Respon Taiwan terhadap rencana reunifikasi yang direncanakan China dapat ditinjau dari sudut pandang konstruktivisme sistematis, karena memfokuskan pada identitas dan struktur internasional suatu negara. Proses reunifikasi Taiwan-China melalui kebijakan *One China Policy* dapat dikatakan sebagai konstruksi identitas karena kebijakan tersebut merupakan konsep nasionalisme dan identitas China yang digunakan untuk menyatukan seluruh China. Alexander Wendt merupakan seorang profesor di *Ohio State University*, yang mengemukakan teori konstruktivisme sistematis. Menurut Wendt, identitas suatu negara cenderung mempengaruhi interaksi antar negara di lingkungan internasional sebagai suatu aktor. Wendt memandang masalah yang dihadapi Taiwan dan China sama dengan konstruktivisme memandang suatu negara sebagai aktor. Tindakan suatu negara didasarkan pada pemaknaan yang muncul pada negara tersebut dalam proses interaksinya di lingkungannya.

Desakan kebijakan *One China Policy* oleh China terhadap Taiwan menyebabkan semakin kuatnya rasa nasionalisme Taiwan, terutama pada Partai Koumintang. Dengan diangkatnya Lee Teng Hui sebagai presiden Taiwan oleh Chiang Ching Kuo secara langsung tahun 1988, Chiang Ching Kuo mengharapkan adanya orang asli Taiwan yang mempertahankan legitimasi Partai Koumintang. Presiden Lee menggunakan konstruksi identitas untuk memunculkan nasionalisme masyarakat Taiwan terhadap tanah air mereka. Respon Lee Teng Hui terhadap *One China Policy* pada masa kepemimpinan Deng Xioping adalah dengan merevisi kembali arti 'China' dalam *One China Policy*. Tahun 1991 merupakan awal dibentuknya Dewan Unifikasi Nasional yang menghasilkan *Guideline on National Reunification*.

Identitas dan kepentingan aktor dibentuk oleh ide yang diyakini bernama '*shared knowledge*' atau pemahaman dasar aktor mengenai dirinya. Melalui *share knowledge* inilah Taiwan dan China saling mengidentifikasi identitas siapa Taiwan dan siapa China yang akhirnya menimbulkan praktik berupa respon untuk mendorong tindakan sesuai penafsiran aktor dan kepentingannya. Tindakan tersebut juga mendorong aktor untuk melakukan perubahan-perubahan dalam interaksinya di lingkungan internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa

konstruktivisme memandang politik internasional sebagai suatu konstruksi sosial yaitu proses terjadinya interaksi antar aktor, dimana lingkungan sosial politik dan manusia saling berinteraksi untuk menghasilkan perubahan-perubahan.

Hubungan China-Taiwan

Keluarnya *One China Policy* menjadikan hubungan keduanya memburuk yang mana China tetap menginginkan terjadinya reunifikasi Taiwan yang dianggap masih menjadi bagian dari negaranya. Sementara Taiwan terus berupaya menjadi negara yang independen. Hubungan China dan Taiwan sejak berlakunya *One China Policy* mengalami perubahan seiring dengan perubahan kepemimpinan dalam negeri Taiwan. Pada masa pemerintahan Chiang Kai-shek, ia mendorong Taiwan menuju unifikasi dan beranggapan bahwa China masih berada di bawah pemerintahan KMT. Pada masa pemerintahannya pun eksistensi partai Komunis masih ditolak. Bahkan ia menyiapkan tentaranya di pulau Jinmen dan Mazu untuk mempersiapkan penyerangan menggulingkan kekuasaan PKC di China (U. S. Departement of State, 2009).

Pada masa kepemimpinan selanjutnya, yaitu pada masa Chiang Ching Kuo hubungan China dan Taiwan mengalami pendinginan. Hal ini dikarenakan pihak China yang berada di bawah pemerintahan Presiden Deng Xiaoping berfokus pada perbaikan ekonomi China. Ia beranggapan bahwa stabilitas merupakan unsur penting dalam peningkatan ekonomi termasuk di dalamnya perdamaian dan stabilitas di wilayah selat Taiwan. (Islami, Skripsi, 2013)

Pada masa pemerintahan Presiden Lee Teng Hui hubungan China-Taiwan memiliki sedikit kemajuan. Pada masa pemerintahannya Taiwan membentuk Dewan Unifikasi Nasional yang kemudian mengeluarkan *Guideline on National Reunification* yang menjelaskan tentang perspektif Taiwan terhadap tiga proses unifikasi, yaitu adanya pertukaran dan timbal balik antara kedua pihak; membangun kepercayaan bersama dan kerjasama; serta proses konsultasi dan unifikasi. Selain itu pemerintah Taiwan juga membentuk *Strait Exchange Foundation* (SEF) yang selanjutnya China juga mendirikan *Association for Relation Across the Taiwan Strait* (ARATS) (Islami, Skripsi, 2013). Kemudian kedua lembaga tersebut mengadakan pertemuan yang menghasilkan Konsensus 1992 atau '*Wang-Koo Talks*' (Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Singapore, 2004). Konsensus tersebut berisi tentang kesepakatan kedua pemerintah tersebut untuk memiliki interpretasi masing-masing mengenai prinsip *One China Policy*. Namun pada masa pemerintahan Lee Teng Hui, kemajuan tersebut tidak bertahan lama karena Taiwan cenderung menjauhi reunifikasi dan melakukan kebijakan Taiwanisasi serta melaksanakan pemilu yang memancing kemarahan China. (Islami, Skripsi, 2013).

Pada masa pemerintahan selanjutnya, masa pemerintahan Chen Shui Bian hubungan keduanya memburuk. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang dikeluarkan pada masa pemerintahannya, seperti kebijakan membentuk identitas pada penduduk Taiwan, berupaya menghambat hubungan ekonomi Taiwan-China, berencana untuk menghapus Dewan Unifikasi Nasional, mengadakan referendum untuk mengubah konstitusi Taiwan dan mengadakan referendum pengajuan keanggotaan Taiwan di PBB. (Islami, Skripsi, 2013).

Pada masa pemerintahan Ma Ying Jeou, terdapat upaya dalam memperbaiki hubungan Taiwan dan China. Hal ini terlihat dalam upaya Taiwan yang memperbaiki hubungan kerjasama dengan China dalam sektor pariwisata dan kerjasama perdagangan yang juga menghasilkan perjanjian *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) (Islami, Skripsi, 2013). Pada masa pemerintahannya juga terdapat pengakuan terhadap Konsensus 1992.

Pada masa pemerintahan selanjutnya, yakni pemerintahan Tsai Ing Weng, hubungan keduanya memburuk. Hal ini disebabkan oleh Tsai Ing Weng yang terus memperjuangkan kemerdekaan Taiwan. Ia bahkan tidak mau mengakui Konsensus 1992 yang mana di dalamnya disebutkan bahwa hanya ada “satu China” melalui kebijakan *One China Policy* (Dewi dan Dewi, *Jurnal HI*, Maret 2019).

Eksistensi Taiwan Dalam Dunia Internasional

Negara merupakan suatu alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menerbitkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat (Budiarjo, 2008). Terdapat syarat berdirinya suatu negara (Marpaung, 2018), yaitu pertama, memiliki rakyat yang mana rakyat merupakan orang-orang atau penduduk yang menetap didalamnya. Suatu negara dapat terbentuk apabila terdapat kesepakatan diantara penduduknya. Kedua, wilayah yang merupakan wilayah yang ditinggali dan dikuasai serta menjadi batas teritorial dari kedaulatan negara. Ketiga, pemerintahan yang merupakan suatu lembaga yang dibentuk yang memegang kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan dari suatu negara. Keempat, pengakuan dari negara lain yang dapat membantu negara untuk menjalin kerjasama dengan negara lainnya di berbagai bidang. Pengakuan dari negara lain sangat penting agar suatu negara mendapatkan haknya dalam dunia internasional. Pada dasarnya Taiwan secara *de facto* sudah memiliki tiga unsur utama dalam membentuk suatu negara Taiwan. Namun, secara *de jure* Taiwan belum mendapatkan pengakuan penuh dari negara lain yang mana pengakuan ini sangat penting untuk mempertegas eksistensi Taiwan di dunia internasional.

Dikeluarkannya *One China Policy* oleh pemerintah China memberikan dampak bagi keduanya, khususnya Taiwan. Sejak diberlakukannya *One China Policy* Taiwan semakin sulit dalam mencapai tujuannya sebagai negara independen dan mendapatkan pengakuan dari dunia internasional sebagai negara yang berdaulat. China juga mengeluarkan kebijakan bagi negara yang ingin menjalin hubungan diplomatik dengan China, maka negara tersebut harus mengakui *One China Policy* dan tidak diperbolehkan menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Hal ini menyulitkan Taiwan dalam mempertegas eksistensinya dalam dunia internasional karena negara-negara akan mempertimbangkan kembali dan cenderung memilih China untuk menjalin hubungan diplomatik. Hal ini dapat disebabkan oleh berpengaruhnya China dalam dunia internasional saat ini sehingga membuat Taiwan sulit untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara berdaulat dari negara-negara di dunia. Saat ini hanya sekitar 25 negara saja yang secara jelas mengakui Taiwan sebagai negara (Matamata Politik, 21 Januari 2021). Bahkan negara-negara tersebut bukanlah negara dengan *power* yang besar.

Taiwan berupaya untuk tergabung dalam organisasi-organisasi internasional di dunia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendapatkan pengakuan dari negara-negara di dunia. Dalam upayanya untuk tergabung dalam organisasi internasional, Taiwan mendapatkan banyak hambatan dan kesulitan. Pada tahun 1971 Taiwan yang dikeluarkan dari keanggotaan PBB yang dilakukan berdasarkan hasil pemungutan suara di PBB. (Wonoadi, UMY Hubungan Internasional, 14 Maret 2013). Hal ini dilakukan dengan dalih bahwa Taiwan merupakan wilayah provinsi dari China yang mana China merasa pihaknya yang mewarisi kedudukan Republik China dan meminta peralihan keanggotaan PBB yang diduduki oleh delegasi Taiwan (Ayurezeki,

Skripsi, 2008). Hingga saat ini Taiwan masih berupaya agar dapat tergabung dalam organisasi PBB (Dewi dan Dewi, *Jurnal HI*, Maret 2019).

Selain itu, dalam keanggotaan Taiwan di organisasi WTO juga memiliki hambatan yang mana Taiwan dapat bergabung dalam organisasi WTO jika China sudah bergabung lebih dulu di dalamnya. (Ayurezeki, Skripsi, 2008). Dalam keanggotaan di WTO, Taiwan tidak diklasifikasi sebagai sebuah negara, tetapi sebagai wilayah *separate customs territory* dengan bea-cukai yang terpisah dari China (Ayurezeki, Skripsi, 2008: 77).

Dalam keanggotaan Taiwan di organisasi WHO juga masih dalam tahap pengupayaan. Taiwan dikeluarkan dari keanggotaan organisasi WHO pada tahun 1972. Namun, saat ini Taiwan dipandang mampu dalam penanganan wabah Covid-19 dan menjadi pertimbangan negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, Kanada, Jepang dan Selandia Baru dalam mendukung keanggotaannya dalam WHO untuk diberikan status sebagai pengamat di WHA (Iswara, Kompas, 16 Mei 2020).

KESIMPULAN

One China Policy dikeluarkan dengan tujuan agar Taiwan kembali pada pemerintahan China setelah KMT sebagai pihak yang kalah dalam perang saudara mendirikan pemerintahan sendiri di Taiwan. Namun, Taiwan yang memiliki perbedaan seperti dalam hal ideologi dan prinsip dalam menjalankan pemerintahan terus menolak untuk melakukan reunifikasi. Dengan hubungan keduanya yang terjalin baik dalam hal kerjasama ekonomi, tetapi tidak membuat Taiwan berhenti memperjuangkan kemerdekaannya. Meskipun Taiwan sudah memenuhi syarat *de facto* berdirinya suatu negara, tetapi hal tersebut tidak cukup untuk menjadikannya sebagai negara berdaulat. Hal ini karena belum adanya pengakuan dari negara lain yang dipersulit oleh *One China Policy*, sehingga menimbulkan problematika dalam eksistensi Taiwan di dunia internasional. Meskipun begitu, Taiwan masih dapat bekerjasama dengan negara lain selain daripada hubungan diplomatik, seperti perdagangan, pendidikan, budaya. Upaya Taiwan dalam mencapai pengakuan di dunia internasional selain dengan berupaya menjadi bagian dari organisasi internasional juga ditopang oleh jalinan hubungan kerjasamanya dengan negara-negara di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Antaranews. (2015). “Sejarah Singkat Taiwan Sejak 1949”. DOI: <https://www.antaraneews.com/berita/527377/sejarah-singkat-taiwan-sejak-1949#:~:text=Berikut%20adalah%20sejarah%20singkat%20Taiwan,dianggap%20sebagai%20bagian%20wilayah%20mereka.&text=Imigrasi%20warga%20China%20ke%20Taiwan,diduduki%20Jepang%20antara%201895-1945>.
- Ayurezeki, A. (2008). “Permasalahan Hukum Keanggotaan Taiwan Dalam World Trade Organization”. Skripsi. Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. DOI: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-9/20326563-S26145-Aisy%20Ayurezeki.pdf> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 20:38
- Budiarjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Cahya, M. L. J. F. (2018). “Kebijakan One China Policy Versi Taiwan Sebagai Respon Reunifikasi Tiongkok Pada Masa Pemerintahan Lee Teng Hui”. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Dewi, I, F. dan Dewi, K. U. (2019). Strategi Pemerintahan Xi Jin Ping Terhadap Taiwan Dalam Mengamankan Kedaulatan Tiongkok. *Jurnal Hubungan Internasional*, 7(2), 161-168
DOI: <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5631/4140> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 20:50
- Embassy of the People’s Republic of China in the Republic of Singapore (2004). Speech at the Symposium Commemorating the 10th Anniversary of ‘Wang Koo Talks’ DOI: <http://www.chinaembassy.org.sg/eng/dszyhd/t165679.htm> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 14:05 WIB
- Harini, S. (2015). “Analisa Kebijakan Luar Negeri Melalui Perspektif Konstruktivisme Aspirasional”. DOI : http://sri-harini-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-146455-Analisis%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20SOH320-Analisa%20Kebijakan%20Luar%20Negeri%20melalui%20Perspektif%20Konstruktivisme%20Aspirasional.html
- Islami, F. (2013). “Kebijakan Luar Negeri Taiwan Di Bawah Presiden Ma Ying Jeou (2008-2012) Di Bidang Keamanan, Ekonomi, dan Identitas Dalam Hubungan Antar-Selat Taiwan dan China”. Skripsi. Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok. DOI: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20350947-TA-Fahmi%20Islami.pdf> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 14:30 WIB
- Iswara, A. J. (2020). Polemik Taiwan Bukan Anggota WHO, Bagaimana Awalnya Terjadi?. *Dalam Kompas*, 16 Mei 2020. Taipei DOI: <https://www.kompas.com/global/read/2020/05/16/125459870/polemik-taiwan-bukan-anggota-who-bagaimana-awalnya-terjadi?page=all#page2>
- Marpaung, L. A. (2018). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Penerbit Andi

- Matamata Politik (2021). “Apakah Taiwan Negara Merdeka Atau Bagian China?”. 21 Januari 2021 DOI: <https://www.matamatapolitik.com/serangan-militer-china-di-sekitar-taiwan-bukan-tanda-dimulainya-perang-opini/>
- Slate.com (2000). What Is the One-China Policy? DOI: <https://slate.com/news-and-politics/2000/05/what-is-the-one-china-policy.html> diakses pada 21 Januari 2021, pukul 20.30 WIB
- U. S. Departement of State (2009). The Taiwan Strait Crises: 1954-55 and 1958. DOI: <https://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/lw/88751.htm> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 13:00 WIB
- Unknown. *Kebijakan Satu China*. UMY Repository. DOI: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/12247/f.Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 20 Januari 2021, pukul 00.33 WIB
- Unknown. *One China Policy dan Implikasinya Terhadap Hubungan Indonesia – Taiwan*. DOI: <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/14838/BAB%20III.pdf?sequence=6&isAllowed=y> diakses pada 21 Januari 2021, pukul 19.57 WIB
- Wonoadi, G. L. (2013). *Menelisik Kedaulatan Taiwan*. Dalam UMY Hubungan Internasional, 14 Maret 2013, Yogyakarta DOI: <https://hi.umy.ac.id/menelisik-kedaulatan-taiwan/> diakses pada 20 Januari 2021 pukul 21:00 WIB